



PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102

Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id

AMBON - MALUKU - 97117

Nomor : W27-U/2236 / OT.01.2/11/2022

Ambon, 17 November 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

YTH. Ketua Pengadilan Negeri Hunipopu

Di

Jl. Pendidikan Desa, Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat Propinsi Maluku

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memperoleh nilai sebesar **71,2** atau **BB (Sangat Baik)**
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen / Sub Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja			20,10
2	Pengukuran Kinerja			21,60
3	Pelaporan Kinerja			12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja				71,20
			Predikat	BB (Sangat Baik)



PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102

Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id

AMBON - MALUKU - 97117

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat juknis perencanaan kinerja
2.	Belum terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
3.	Belum terdapat pohon kinerja (cascading)
4.	Belum ada Crosscutting
5.	Belum terdapat perjanjian individu berjenjang
6.	Belum terdapat laporan capaian Komdanas bulanan dan Triwulan
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2.	Belum terdapat Laporan capaian Komdanas bulanan dan Triwulan
3.	Belum terdapat Dokumen Reviu SOP
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Belum terdapat Dokumen Reviu IKU dan Reviu Renstra 2020-2024
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum terdapat dokumen rapat berjenjang bagian kesekretariatan
2.	Belum terdapat dokumen yang menggambarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3.	Belum terdapat dokumen yang menggambarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
4.	Belum terdapat dokumen yang menggambarkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Juknis Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum tahun berjalan
2.	Agar dibuatkan Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
3.	Agar dibuatkan Pohon Kinerja dan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading)
4.	Agar dibuatkan penjelasan dan informasi yang menunjukkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antara bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
5.	Agar dibuatkan Perencanaan Kinerja masing-masing tugas dan fungsi sampai level pegawai/pelaksana dimana beban kerja telah di bagi habis.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar dibuatkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2.	Agar dibuatkan Dokumen Reviu SOP
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar dibuatkan Dokumen Reviu IKU dan Reviu Renstra 2020-2024
D. Evaluasi Kinerja	
1.	Agar dilakukannya rapat berjenjang bagian kesekretariatan dan didokumentasikan
2.	Agar dibuatkan dokumen yang menggambarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102

Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id

AMBON - MALUKU - 97117

3.	Agar dibuatkan dokumen yang menggambarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
4.	Agar dibuatkan dokumen yang menggambarkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tahun 2022 dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Kepala Badan Pengawasan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Pengadilan Tinggi Ambon



Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H
NIP. 195711011984031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
2. Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I;
4. Kementerian PAN dan RB